

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016**



JL. M. Pardi No. 7 Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Semarang, 30 Juni 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
NIP. 19610802 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	(i)
Daftar Isi.....	(ii)
Daftar Tabel.....	(iii)
Pernyataan Tanggung Jawab.....	(iv)
Ringkasan.....	(1)
I Laporan Realisasi Anggaran.....	(3)
II Neraca.....	(4)
III Laporan Operasional.....	(5)
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	(6)
V Catatan atas Laporan Keuangan.....	(7)
A Penjelasan Umum.....	(8)
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	(16)
B.1 Pendapatan.....	(16)
B.2 Belanja.....	(17)
B.2.1 Belanja Pegawai.....	(18)
B.2.2 Belanja Barang.....	(18)
B.2.3 Belanja Modal Tanah.....	(19)
B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	(20)
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	(21)
C.1 Aset Lancar.....	(21)
C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan.....	(21)
C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	(21)
C.1.3 Persediaan.....	(21)
C.2 Aset Tetap.....	(22)
C.2.1 Tanah.....	(22)
C.2.2 Peralatan dan Mesin.....	(22)
C.2.3 Gedung dan Bangunan.....	(23)
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	(23)
C.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	(23)
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	(23)
C.3 Kewajiban Jangka Pendek.....	(24)
C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga.....	(25)
C.4 Ekuitas.....	(26)

C.4.1	Ekuitas.....	(26)
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	(27)
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	(27)
D.2	Beban Pegawai.....	(27)
D.3	Beban Persediaan.....	(28)
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	(28)
D.5	Beban Pemeliharaan.....	(29)
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	(30)
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	(30)
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	(31)
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	(32)
E.1	Ekuitas Awal.....	(32)
E.2	Surplus/Defisit-LO.....	(32)
E.3	Penyesuaian Nilai Aset.....	(32)
E.4	Transaksi Antar Entitas.....	(32)
E.5	Ekuitas Akhir.....	(32)
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	(32)
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	(32)
F.2	Pengungkapan Lain-lain.....	(32)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	(12)
Tabel 2.....	(14)
Tabel 3.....	(16)
Tabel 4.....	(16)
Tabel 5.....	(17)
Tabel 6.....	(17)
Tabel 7.....	(18)
Tabel 8.....	(18)
Tabel 9.....	(19)
Tabel 10.....	(19)
Tabel 11.....	(20)
Tabel 12.....	(21)
Tabel 13.....	(21)
Tabel 14.....	(22)
Tabel 15.....	(22)
Tabel 16.....	(23)
Tabel 17.....	(24)
Tabel 18.....	(24)
Tabel 19.....	(25)
Tabel 20.....	(26)
Tabel 21.....	(27)
Tabel 22.....	(27)
Tabel 23.....	(28)
Tabel 24.....	(29)
Tabel 25.....	(29)
Tabel 26.....	(31)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 30 Juni 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
NIP. 19610802 198903 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.311.574.515,00 atau mencapai 66,23% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.000.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp7.103.711.030,00 atau mencapai 14,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp47.836.221.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2016.

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.003.310.659,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp856.812.792,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.146.497.867,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp11.703.310.659,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp3.309.747.306,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.071.993.751,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.876.029.115,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-6.876.029.115,00 dan Defisit Rp 3.597.708.575,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-3.597.708.575,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp11.503.670.817,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-

3.597.708.575,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.804.151.515,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai Rp11.703.310.659,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015**

Uraian	Catatan	30 Juni 2016			30 Juni 2015
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.000.000.000,00	3.311.574.515,00	66,23	3.258.904.819,00
Jumlah Pendapatan		5.000.000.000,00	3.311.574.515,00	124,59	3.258.904.819,00
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	6.052.860.000,00	3.239.655.519,00	53,52	2.470.278.426,00
Belanja Barang	B.2.2	7.415.111.000,00	3.385.395.511,00	45,66	2.587.521.081,00
Jumlah Belanja Operasi		13.467.971.000,00	6.625.051.030,00	49,00	5.057.799.507,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah	B.2.3	33.849.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.4	519.000.000,00	478.660.000,00	92,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		34.368.250.000,00	478.660.000,00	1,39	0,00
Jumlah Belanja		47.836.221.000,00	7.103.711.030,00	14,85	5.057.799.507,00

Semarang, 30 Juni 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
NIP. 19610802 198903 1 003

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
NERACA
PER 30 JUNI 2016 dan 31 DESEMBER 2015

Uraian	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	300.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0,00	1.086.460,00
Persediaan	C.1.3	556.812.792,00	509.362.809,00
Jumlah Aset Lancar		856.812.792,00	510.449.269,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	1.440.707.900,00	1.440.707.900,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.028.778.595,00	7.550.118.595,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	10.521.525.802,00	10.521.525.802,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	5.050.000,00	5.050.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	45.954.000,00	45.954.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-7.015.266.470,00	-6.795.807.071,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-1.878.231.962,00	-1.741.058.428,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-2.019.998,00	-1.857.915,00
Jumlah Aset Tetap		11.146.497.867,00	11.024.632.883,00
Jumlah Aset		12.003.310.659,00	11.535.082.152,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	0,00	31.411.335,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	300.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		300.000.000,00	31.411.335,00
Jumlah Kewajiban		300.000.000,00	31.411.335,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	11.703.310.659,00	11.503.670.817,00
Jumlah Ekuitas		11.703.310.659,00	11.503.670.817,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12.003.310.659,00	11.535.082.152,00

Semarang, 30 Juni 2016
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
 NIP. 19610802 198903 1 003

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015**

Uraian	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.309.747.306,00	3.241.972.604,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.309.747.306,00	3.241.972.604,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.239.655.519,00	2.470.278.426,00
Beban Persediaan	D.3	150.920.194,00	498.554.172,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.254.261.917,00	913.265.652,00
Beban Pemeliharaan	D.5	392.888.922,00	212.453.195,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.481.507.547,00	914.643.622,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	356.795.016,00	354.413.528,00
JUMLAH BEBAN		6.876.029.115,00	5.363.608.595,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-3.566.281.809,00	-2.121.635.991,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	3.000.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	-1.214.750,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	740.749,00	13.189.315,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	32.167.515,00	2.835.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-31.426.766,00	12.139.565,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-3.597.708.575,00	2.109.496.426,00

Semarang, 30 Juni 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
NIP. 19610802 198903 1 003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
EKUITAS AWAL	E.1	11.503.670.817,00	12.165.119.386,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-3.597.708.575,00	-2.109.496.426,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-6.803.098,00	-1.118.970,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.804.151.515,00	1.809.013.688,00
EKUITAS AKHIR		11.703.310.659,00	11.863.517.678,00

Semarang, 30 Juni 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Heru Wahyupraja
NIP. 19610802 198903 1 003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Karantina Pertanian, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di tempat pemasukan / pengeluaran dan/ atau di luar tempat pemasukan/ pengeluaran.

Ruang lingkup kegiatan:

Pelayanan jasa karantina pertanian dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dari wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya.
- e. Melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas maka BKP Kelas I Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pelaksanaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi tersebut di atas dan untuk lebih mempercepat pembangunan karantina pertanian menuju visi , misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, berpedoman pada 6 pilar kebijakan dan rencana strategis yaitu :

- a. Peningkatan infrastruktur
- b. Peningkatan kelembagaan
- c. Pengembangan teknologi informasi
- d. Penguatan SDM
- e. Penguatan peraturan perundang-undangan dan sistem perkarantinaan, dan
- f. *Public Awareness*

A.1.2. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai

Visi

Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati serta keamanan pangan segar di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pengertian Modern dan Terpercaya adalah sebagai berikut :

Modern :

Penyelenggaraan karantina pertanian untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk menyajikan data dan sarana pelayanan terkini.

Terpercaya :

Keberhasilan BKP Kelas I Semarang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan BKP Kelas I Semarang perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Misi

- a. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati Di Provinsi Jateng dan sekitarnya.
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Provinsi Jateng dan sekitarnya.
- c. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.
- d. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian di Provinsi Jateng dan sekitarnya.

Motto : **“Bersama Anda Melindungi Negeri”**

Kebijakan Mutu Layanan

Kami bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan prima menuju “Good Government dan Clean Governance “ dengan:

- Meningkatkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai;
- Menjadi contoh keteladanan untuk sesama;
- Bertindak secara profesional;
- Berintegritas tinggi; dan
- Disiplin dalam setiap kegiatan.

Maklumat Pelayanan :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Kualitas Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Tabel 3
Pos-pos Realisasi Anggaran*

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.240.360,000,00	6,052,860,000,00
Belanja Barang	7.714.411.000,00	7,415,111,000,00
Belanja Modal	34,368,250,000,00	34,368,250,000,00
Jumlah Belanja	48.323.021.000,00	47,836,221,000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp3.311.574.515,00 atau mencapai 66,23% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	30 Juni 2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	5.000.000.000,00	3.310.833.766,00	66,21
Penerimaan Belanja TAYL	0,00	740.749,00	0,00
Jumlah	5.000.000.000,00	3.311.574.515,00	66,23

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,00% dibandingkan 30 Juni 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	3.000.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa	3.310.833.766,00	3.242.715.504,00	2,10
Penerimaan Belanja TAYL	740.749,00	13.189.315,00	-94,38
Jumlah	3.311.574.515,00	3.258.904.819,00	1,62

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp7.104.821.344,00 atau 14,85% dari anggaran belanja sebesar Rp47.836.221.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2016

Uraian	2016			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		6.052.860.000,00	3.240.210.676,00	53,53
Belanja Barang		7.415.111.000,00	3.385.395.511,00	45,66
Belanja Modal		34.368.250.000,00	478.660.000,00	1,39
Total Belanja Kotor		47.836.221.000,00	7.104.266.187,00	14,85
Pengembalian Belanja			555.157,00	0,00
Total Belanja		47.836.221.000,00	7.103.711.030,00	14,85

Dibandingkan dengan per 30 juni 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 40,45% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena kenaikan Gaji Pokok PNS TA 2016, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Fungsional, dll
2. Pembayaran belanja pegawai gaji ke 13

3. Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) TA 2016

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	.%
Belanja Pegawai	3.239.655.519,00	2.470.278.426,00	31,15
Belanja Barang	3.385.395.511,00	2.587.521.081,00	30,84
Belanja Modal	478.660.000,00	0,00	100,00
Total Belanja	7.103.711.030,00	5.057.799.507,00	40,45

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.239.655.519,00 dan Rp2.470.278.426,00. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 31,15% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan pangkat 17 Pegawai, Kenaikan gaji berkala 19 pegawai .
2. Kenaikan Tunjangan Fungsional 1 Pegawai , Kenaikan gaji april TA 2016

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.240.210.676,00	2.470.286.388,00	36,03
Belanja Lembur	0,00	88.334.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.240.210.676,00	2.470.286.388,00	31,17
Pengembalian Belanja Pegawai	-555.157,00	-7.962,00	6.872,58
Jumlah Belanja	3.240.765.833,00	2.470.278.426,00	31,15

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.385.395.511,00 dan Rp2.587.521.081,00. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 30,84% % dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja barang operasional disebabkan SBU tahun 2016 mengalami kenaikan untuk pembayaran honorarium satpam, pramubakti dan sopir, pengadaan seragam dinas pegawai, kegiatan dan untuk keperluan sehari-hari

- perkantoran.
2. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi terhadap pengguna jasa karantina
 3. Peningkatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat, roda dua karena aus dan karatan akibat rob air laut
 4. Peningkatan frekuensi perjalanan dalam rangka pemeriksaan tindak karantina diluar pintu pemasukan dan pengeluaran karantina

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	775.395.952,00	525.469.122,00	47,56
Belanja Barang Non Operasional	87.423.400,00	61.481.000,00	42,19
Belanja Barang Persediaan	284.560.500,00	357.638.600,00	-20,43
Belanja Jasa	422.853.900,00	359.452.558,00	17,64
Belanja Pemeliharaan	333.654.212,00	368.836.179,00	-9,54
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.481.507.547,00	914.643.622,00	61,98
Jumlah Belanja Kotor	3.385.395.511,00	2.587.521.081,00	30,83
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.385.395.511,00	2.587.521.081,00	30,83

B.2.3 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp469.460.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh kebutuhan peralatan mesin seperti Kendaraan roda empat, alat pengolah data dan komunikasi, AC dan mebelair

Tabel 11
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2016	Realisasi 30 Juni 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	478.660.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	478.660.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	478.660.000,00	0,00	0,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Rekening Bank	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.086.460,00. Yang telah disetor tanggal 4 Januari 2015.

Tabel 13

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Uang Tunai	0.00	1.086.460.00
-	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp556.812.792,00 dan Rp509.362.809,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	318,152,623,00	262.956.215,00
Bahan untuk Pemeliharaan	70,503,400,00	56.058.900,00
Suku Cadang	167,791,369,00	188.263.494,00
Bahan Baku	365,400,00	1.985.200,00
Persediaan Lainnya	0,00	99.000,00
Jumlah	556.812.792,00	509.362.809,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.440.707.900,00 dan Rp1.440.707.900,00.

Tabel 15
Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	502,00m2	Jl. Gedang Anak , Ungaran	142.350.000,00
2.	322,00m2	Jl.Taman Bunga Sisemut, ungaran barat	209.118.000,00
3.	1.737,00m2	Jl, Raya Polaman, Mijen	258.034.900,00
4.	2.798,00m2	Karangroto , Genuk	831.205.000,00
Jumlah			1.440.707.900,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.028.778.595,00 dan Rp7.550.118.595,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16
Mutasi Peralatan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	7.550.118.595,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	469.460.000,00
Pengembangan Nilai Aset	9.200.000,00
Saldo per 30 Juni 2016	8.028.778.595,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2016	-7.015.266.470,00
Nilai Buku per 30 Juni 2016	1.013.512.125,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Pembelian Peralatan Mesin antara lain :

1. Alat Angkut Darat Motor 1 Unit Rp. 324.010.000,-
2. Alat Ukur 1 Buah Rp. 15.800.000,-
3. Alat Kantor 16 Buah Rp. 26.750.000,-
4. Alat Rumah Tangga 5 Buah Rp. 23.800.000,-
5. Alat Studio 7 Buah Rp. 6.125.000,-
6. Komputer Unit 7 Buah Rp. 47.075.000,-
7. Peralatan Komputer 10 Buah Rp. 25.900.000,-

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.521.525.802,00 dan Rp10.521.525.802,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.050.000,00 dan Rp5.050.000,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp45.954.000,00 dan Rp45.954.000,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-8.895.518.430,00 dan Rp-8.538.723.414,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8.028.778.595,00	-7.015.266.470,00	1.013.512.125,00
2.	Gedung dan Bangunan	10.521.525.802,00	-1.878.231.962,00	8.643.293.840,00
3.	Jaringan	5.050.000,00	-2.019.998,00	3.030.002,00
4.	Aset Tetap Lainnya	45.954.000,00	0,00	45.954.000,00
Akumulasi Penyusutan		18.601.308.397,00	-8.895.518.430,00	9.705.789.967,00

C.3 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.3.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.411.335,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang per tanggal pelaporan disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	31.411.335,00
Jumlah	0,00	31.411.335,00

C.3.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4 EKUITAS

C.4.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 11.703.310.659,00 dan Rp 11.503.670.817,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.309.747.306,00 dan Rp3.241.972.604,00. Realisasi pendapatan operasional jasa sensor karantina terjadi kenaikan sebesar 2,09% dibanding tahun lalu karena terjadi peningkatan kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan wilayah kerja BKP Kelas I Semarang. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 19
Perbandingan PNBK Lainnya
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015*

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	3.309.747.306,00	3.241.972.604,00	2,09
Jumlah	3.309.747.306,00	3.241.972.604,00	2,09

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.240.210.676,00 dan Rp2.470.286.388,0. Beban operasional meningkat 31,15% dibanding tahun yang lalu karena pembayaran gaji ke- 14 yang baru dibebankan pada tahun bersangkutan. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan

kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 20
Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2.348.273.240,00	1.583.918.760,00	48,25
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.872,00	55.527,00	-52,70
Beban Tunj. Anak PNS	46.781.954,00	35.541.574,00	31,62
Beban Tunj. Beras PNS	118.334.280,00	128.987.480,00	8,25
Beban Tunj. Fungsional PNS	244.110.000,00	190.560.000,00	28,10
Beban Tunj. PPh PNS	42.573.473,00	32.720.455,00	30,11
Beban Tunj. Struktural PNS	23.940.000,00	20.520.000,00	16,66
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	158.806.700,00	123.098.630	29,00
Beban Tunjangan Umum PNS	48.170.000,00	43.745.000,00	11,38
Beban Uang Lembur	0,00	88.334.000,00	-100
Beban Uang Makan PNS	208.636.000,00	222.797.000,00	-6,35
Jumlah	3.239.655.519,00	2.470.278.426,00	31,15

Terjadi peningkatan beban belanja pegawai karena Kenaikan pangkat 17 Pegawai, gaji berkala 19 pegawai dan .Kenaikan Tunjangan Fungsional 1 Pegawai , Kenaikan gaji april TA 2016 serta pembayaran gaji ke 14 pegawai

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp150.920.194,00 dan Rp498.554.172,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Beban Persediaan
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1.619.800,00	591.950,00	173,64
Beban Persediaan konsumsi	149.201.394,00	497.317.222,00	-70,00
Beban persediaan lainnya	99.000,00	645.000,00	-84,65
Jumlah	150.920.194,00	498.554.172,00	-69,73

Terjadi penurunan beban persediaan sebesar -69,73% dibanding tahun lalu karena stock barang persediaan habis pakai masih cukup banyak dan diperkirakan dapat mencukupi hingga akhir tahun

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.254.261.917,00 dan Rp913.265.652,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Bahan	71.923.400,00	48.631.000,00	47,90
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	101.580.000,00	92.350.000,00	10,00
Beban Honor Output Kegiatan	15.500.000,00	12.850.000,00	20,62
Beban Jasa Lainnya	14.205.000,00	13.010.000,00	9,19
Beban Jasa Profesi	7.900.000,00	11.400.000,00	-30,70
Beban Keperluan Perkantoran	582.298.692,00	346.339.704,00	68,13
Beban Langganan Air	64.165.807,00	7.369.885,00	770,65
Beban Langganan Listrik	142.194.479,00	162.515.818,00	-12,50
Beban Langganan Telepon	27.332.577,00	27.298.436,00	0,13
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	89.713.000,00	85.140.000,00	5,37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.804.260,00	1.639.418,00	10,06
Beban Sewa	135.644.702,00	104.721.391,00	29,53
Jumlah	1.254.261.917,00	913.265.652,00	37,34

Terjadi kenaikan beban barang dan jasa sebesar 37,34% karena meningkatnya kegiatan operasional kantor seperti barang cetakan, stopmap, alat tulis kantor, alat rumah tangga, meningkatnya sewa, dll

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp392.888.922,00 dan Rp212.453.195,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

*Tabel 23
Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015*

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.745.840,00	80.519.000,00	-95,35
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.900.000,00	8.704.000,00	-43,70
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	325.008.372,00	28.570.000,00	1.037,59
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	19.419.700,00	11.562.205,00	67,96
Beban Persediaan suku cadang	39.815.010,00	83.097.990,00	-52,09
Jumlah	392.888.922,00	212.453.195,00	84,93

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.481.507.547,00 dan Rp914.643.622,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
*Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015*

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.269.359.120,00	814.003.102,00	55,94
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.250.000,00	48.400.000,00	115,39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.898.427,00	52.240.520,00	106,54
Jumlah	1.481.507.547,00	914.643.622,00	61,98

Terjadi peningkatan beban perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota sebesar 61,98% karena meningkatnya kegiatan pemeriksaan karantina

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp356.795.016,00 dan Rp354.413.528,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
*Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015*

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.173.534,00	137.173.535,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	162.083,00	162.083,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	219.459.399,00	217.077.910,00	1,10
Jumlah	356.795.016,00	354.413.528,00	0,67

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

Uraian	30 Juni 2016	30 Juni 2015	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-1.214.750,00	-100,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-32.167.515,00	-2.835.000,00	1.034,66
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	3.000.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740.749,00	13.189.315,00	-94,38
Jumlah	-31.426.766,00	12.139.565,00	-358,88

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.503.670.817,00 dan Rp11.503.670.817,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp-3.597.708.575,00 dan Rp Rp-2.109.496.426,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015.

E.4 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-6.803.098,00 dan Rp-1.118.970,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.804.151.515,00 dan Rp1.809.013.688,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 27
Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.103.711.030,00
Diterima dari Entitas Lain	-3.311.574.515,00
Transfer Masuk	12.015.000,00
Jumlah	3.804.151.515,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.703.310.659,00 dan Rp11.503.670.817,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-